

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

Korporasi-ekonomi hingga terjadi hegemoni yang melibatkan kompromi kepentingan antara pengusaha-penguasa. Sebagaimana pernyataan Gramsci dalam mengartikan hegemoni dalam pandangan kelas marxis, kegiatan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, lazim dilakukan oleh pelaku kebijakan dan pemilik modal yang saling menguntungkan. Pengusaha yang memiliki kekuatan finansial dan penguasa yang memiliki kekuatan pelayanan, yang berpotensi monopoli kebijakan. Gramsci salah satu pemikir yang merumuskan konsep Hegemoni. Dalam terapannya menganalisis Struktural bangunan Negara, terutama dalam pandangan kekuasaan yang hegemoni. Sama halnya dalam kekuasaan SBY yang hegemonik.

Hegemoni pengusaha yang terkonsolidasikan oleh kekuasaan SBY. melibatkan berbagai macam metodeologi yang dilakukan demi tercapainya puncak hegemonik kekuasaan. Satu persatu kelompok sosial terhegemonik dengan pendekatan struktural yayasan dan perusahaan, melalui menetapkan beberapa kerabat dan keluarga duduk dalam struktur organisasi, baik yayasan maupun perusahaan. Gramsci menyebutkan dengan pendekatan konsensus untuk mendapatkan persetujuan. Maka, aksi sosial yayasan yang beralih kepedulian yang memiliki misi politik hegemonik.

## **-A. Kesimpulan**

Gramsci di Bab. Sebelumnya menggambarkan bahwa hegemoni merupakan pengorganisasian untuk mendapatkan persetujuan dari kelompok lain untuk mendapatkan dukungan mayoritas. Hal ini diperoleh dengan cara peran perspektif ganda dalam tindakan politik "kekuatan dan konsensus, otoritas dan hegemoni, kekerasan dan kesopanan". jadi, dengan kata lain hegemoni merupakan organisasi konsensus.

Kepemimpinan politik dianalisis sebelum dan sesudah meraih kekuasaan. SBY yang notabane berdarah TNI yang memiliki kekuatan hegemoni barisan bersenjata, di samping itu merupakan tokoh politik yang memiliki kedekatan pengusaha-pengusaha besar. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

### **1) Oligarki Ekonomi/Kroni Kapitalisme**

Terjadinya pembangunan oligarki ekonomi dalam kekuasaan SBY. Di dalam bahasa ladsan teori adalah adanya kroni kapitalisme dalam kekuasaan SBY. Misalnya kelompok sampoerna, kelompok bakrie, dan selain itu perusahaan-perusahaan yang ikut atau dipimpin oleh kerabatnya sendiri, atau sejumlah kader partai Demokrat serta sehabatnya yang diangkat untuk menjad komisaris di berbagai perusahaan dan badan usaha milik Negara.

## **2) Konsensus dan Persuasi melalui Yayasan**

Selain perusahaan yang berperan dalam hegemonik kekuasaan SBY, Yayasan juga berperan aktif dalam tidakan konsesus ke semua kelompok sosial diantaranya; yayasan puri cikeas, yayasan dzikir, yayasan batik dan yayasan yang berafiliasi dengan kekuasaan SBY. Penulis mengatakan bahwa ini merupakan aksi sosial yang bertujuan politik kekuasaan, untuk menjaga stabilitas mempertahankan kekuasaan SBY.

## **3) Hegemonik ; 'Nasional – Kerakyatan'**

Gramsci mengistilahkan hegemoni dengan kata “nasional-kerakyatan” dimana hegemoni memiliki kepentingan kepada semua kelompok/kalangan, maka hal ini terjadi ketika kelompok hegomonik sudah merasah terancam, maka kata Gramsci diperlukan perapian barisan dengan membuat kesepakatan baru, kelompok baru yang terkonsolidasi dengan suatu hegemonic demi kepentingan tidak terganggu. Di sini diperlukan kekuatan aparaturnegera untuk mencegah kekuatan di luar hegemonik. Gramsci menyebutkan ini merupakan revolusi pasif. Perubahan yang dilakukan tidak melibatkan rakyat. misalnya dalam kegiatan penyelewengan kebijakan oleh Sekteratit Gabungan (Satgab) yang mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen, misalnya kasus Bank Century, BLBI, penetapan pimpinan KPK, penetapan pimpinan Kaporli,

intervensi kejaksaan Agung, dan yang terakhir ini akan naiknya harga BBM yang akan melibatkan keputusan DPR-RI.

## **B. Saran**

Hegemoni pengusaha dalam lingkaran kekuasaan SBY untuk meraih kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Pengusaha pada diidentikan hanya bergerak pada wilayah sektor ekonomi bangsa, menopang dari peredaran barang dan jasa. Bukan untuk mempengaruhi kebijakan publik, yang akan merugikan Negara. Kompromi antara pengusaha – penguasa kebanyakan pelanggaran hukum yang berskala besar. Peredaran perusahaan tanpa bayar pajak, perusahaan yang bermasalah tanpa diadili secara hukum, akibat balas budi atas kompromi sebelumnya.

Kritikan penulis terhadap kekuasaan SBY yang menggunakan kompromi penguasa-penguasa mengakibatkan hegemonik yang kokoh. Selalu tersistem melakukan kecurangan. Maka, jangan heran pemberantasan Korupsi di Negara ini selalu diperlihatkan hanya semu belaka. Jadi, ketegasan dalam memimpin sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan yang peduli atas rakyat secara keseluruhan bukan kebijakan atas kepentingan kroni, kerabat atau sehabat.